

BAB II

LANDASAN TEORETIS

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Partisipasi Masyarakat

2.1.1.1 Ruang Lingkup Partisipasi Masyarakat

Menurut Anwas (2013:93) Partisipasi masyarakat adalah usaha sadar yang dilakukan baik oleh individu maupun kelompok dalam melakukan suatu kegiatan dengan tetap memperkuat potensi dan daya dukung yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Dalam melakukan partisipasi masyarakat memerlukan sebuah kontribusi yang signifikan dari masyarakat untuk dapat mewujudkan suatu tujuan yang sudah ditentukan baik secara fikiran, moral, tenaga maupun barang dalam pembangunan.

Menurut (Dwiyanto 2011:240) dan (Meilinawati 2018:90), Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan dan keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang secara langsung dan tidak langsung yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab dalam suatu kegiatan mulai dari tahap persiapan, perencanaan, *design*, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi. Partisipasi dari masyarakat ini sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan suatu wilayah. Kontribusi secara sukarela dalam program pembangunan serta partisipasi yang baik dari masyarakat dapat mempercepat suatu proses pembangunan wilayah. Menurut Isbandi (2007) Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat yang didalamnya meliputi pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah serta keterlibatan masalah untuk membuat solusi dari permasalahan yang terjadi. Selain itu partisipasi dari masyarakat diperlukan untuk menunjang suatu aktivitas masyarakat untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai (Fadjarajani, Indrianeu, and Sriwahyuni

2019:2). Partisipasi masyarakat merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu atau kelompok untuk menyederhanakan, menjelaskan dan menggambarkan suatu kejadian yang didalamnya terdapat informasi-informasi penting yang memerlukan pengkajian secara mendalam agar mampu memperkuat potensi dan daya dukung yang dimiliki oleh setiap masyarakat lokal pada suatu kawasan tertentu.

Dalam melakukan suatu kegiatan partisipasi masyarakat, hal yang sangat dibutuhkan adalah kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kesadaran masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam pengaplikasian partisipasi masyarakat ini. Kesadaran masyarakat bagaikan ruh yang harus terus ditumbuhkan dan dikembangkan secara masif, sistematis dan terencana. Kesadaran ini harus tumbuh secara mandiri dan berkelanjutan, dengan adanya partisipasi masyarakat yang aktif dapat mendukung dalam mewujudkan suatu tujuan (Raharjo et al. 2018).

2.1.1.2 Tahapan Partisipasi Masyarakat

Menurut Nasdian (2006) Partisipasi masyarakat harus dapat direalisasikan dengan maksimal sehingga untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilibatkan secara aktif pada proses dan kegiatan masyarakat. (Uphoff, Cohen, and Goldsmith 1979:51), membagi partisipasi ke beberapa tahapan, yaitu :

- a. Tahap pengambilan keputusan, dalam tahap pengambilan keputusan yang dilakukan meliputi keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan rapat-rapat. Kemudian melakukan perencanaan dan pelaksanaan suatu program.
- b. Tahap pelaksanaan merupakan tahapan terpenting dalam sebuah pelaksanaan suatu program. Pada tahap ini partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan suatu program. Wujud nyata dalam sebuah partisipasi digolongkan menjadi tiga bagian yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran (ide), bentuk sumbangan materi, dan tindakan sebagai anggota proyek.

- c. Tahap evaluasi, merupakan tahapan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu kegiatan yang dilakukan. Tahap evaluasi juga merupakan tahap umpan balik, untuk memberi masukan demi pelaksanaan proyek selanjutnya.
- d. Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu dengan melihat posisi masyarakat sebagai subyek dalam proses pembangunan, maka semakin besar manfaat kegiatan yang dirasakan berarti kegiatan tersebut berhasil mengenai sasaran.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang memerlukan upaya berkelanjutan, dimulai dari tahap perencanaan kemudian masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, kemudian melaksanakan suatu program sampai pada tahap menilai atau evaluasi terhadap program yang dilakukan dan pada tahap akhir yaitu tahap menikmati hasil dari apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama. Tahapan ini merupakan suatu proses yang harus dikerjakan untuk dapat mendapatkan hasil yang optimal.

2.1.1.3 Bentuk Partisipasi Masyarakat

Menurut Sastropetro (1986:80) partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam lima bentuk:

- a. Partisipasi pemikiran, merupakan partisipasi yang dihasilkan berdasarkan ide, gagasan dan ajuan yang dikeluarkan oleh individu yang dapat mendukung dan dapat diaplikasikan pada kegiatan yang dilakukan. Partisipasi pemikiran ini dapat berasal dari pengalaman dan pengetahuan individu, yang kemudian di terapkan di daerahnya.
- b. Partisipasi tenaga, merupakan partisipasi dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program. Dalam hal ini tenaga yang dimaksud adalah berupa pertolongan yang dilakukan ketika terjadi bencana, sebelum terjadi bencana dan setelah bencana terjadi.

- c. Partisipasi keterampilan, merupakan partisipasi dengan memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan tujuan agar masyarakat tersebut memiliki kemampuan dalam meningkatkan kapasitasnya untuk menghadapi bencana.
- d. Partisipasi barang, merupakan partisipasi dalam bentuk menyumbang barang atau harta benda. Barang yang disumbangkan dapat berupa makanan pokok, pakaian, alat sekolah, maupun kebutuhan lainnya yang dapat membantu ketika terjadi bencana.
- e. Partisipasi uang, merupakan bentuk partisipasi untuk memperlancar kegiatan-kegiatan dalam proses penanggulangan bencana sehingga kegiatan berjalan dengan lancar dan tercapainya kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.

Menurut Rahman (2014:82) Kelima bentuk partisipasi masyarakat tersebut dibagi menjadi dua jenis. berdasarkan keterlibatannya yaitu :

- a. Partisipasi langsung adalah partisipasi yang terjadi apabila individu atau kelompok dalam suatu kegiatan hanya memberikan atau mengajukan pandangan dan membahas pokok permasalahan diantaranya berupa dana, barang, tenaga kerja (SDM), maupun sarana prasana.
- b. Partisipasi tidak langsung adalah partisipasi yang terjadi apabila individu atau kelompok mendelegasikan hak partisipasinya diantaranya berupa ide pemikiran suatu kegiatan maupun pengambilan keputusan.

Selain itu, bentuk dari partisipasi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu jenis partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (kongkrit) dan juga jenis partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi secara nyata misalnya tenaga, uang, ketrampilan. Sedangkan partisipasi tidak nyata adalah hasil pemikiran, partisipasi sosial (Sulistiyorini, Darwis, dan Gutama 2016, 79).

Berdasarkan bentuk pengklasifikasian partisipasi masyarakat diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dibedakan menjadi partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung. Bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat secara langsung atau nyata dalam hal tenaga, keterampilan, barang dan uang serta untuk partisipasi tidak langsung lebih kepada ide/gagasan atau pemikiran dari masyarakat.

2.1.1.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Dalam sebuah partisipasi masyarakat didukung oleh faktor-faktor penunjang yang dapat mempengaruhi partisipasi tersebut. Seperti yang disampaikan (Hapsari et al. 2012:58) bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi adalah :

a. Umur

Sesorang dikatakan matang dalam melakukan aktivitas tidak hanya diukur oleh tingkat umur, melainkan dilihat dari kemampuan berpikirnya. Tidak jarang seseorang yang memiliki umur yang sudah matang, memiliki tingkat berpikir yang rendah.

b. Lama bermukim

Semakin lama masyarakat bermukim atau berdomisili pada suatu wilayah, secara turun temurun menjalankan kehidupan tradisional yang dicirikan dengan eratnya hubungan mereka dengan lingkungan sekitar.

c. Tingkat Pendidikan

Pendidikan dapat memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Pendidikan dapat membuat seseorang berfikir secara logis, sistematis dan bijaksana. Seseorang yang memiliki pendidikan formal lebih tinggi diharapkan akan lebih mampu menganalisis manfaat yang akan diperoleh dari kegiatan yang dilakukan.

d. Jenis kelamin

Nilai sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dalam kebiasaan, seperti kaum laki-laki yang boleh bekerja dan kaum perempuan hanya mengurus rumah tangga. Namun seiring perkembangan zaman karena adanya gerakan emansipasi wanita dan pendidikan wanita yang semakin baik, maka peran wanita sangat dipertimbangkan dalam pembangunan masyarakat.

e. Pekerjaan dan penghasilan

Pekerjaan seseorang dapat menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan yang baik dan dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Kelima faktor tersebut dapat menjadi patokan terhadap hal yang mendukung dalam partisipasi masyarakat. Namun dalam kenyataannya bisa saja tidak demikian bisa lebih baik atau sebaliknya. Selain itu dalam mengintegrasikan nilai-nilai warisan alam dan budaya yang menjadi ciri kepribadian wilayahnya sangat penting memperhatikan aspek partisipasi masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat setempat dapat menjadi sebuah dukungan, kerjasama serta rasa tanggung jawab yang luas sehingga dapat memberikan keseimbangan terhadap perlindungan maupun konservasi wilayah alam serta wilayah budaya (Amorfini, Bartelletti, dan Ottria 2011).

2.1.2 Penanggulangan Bencana

2.1.2.1 Definisi Bencana

Bencana merupakan anugerah dan berkah yang harus dihadapi oleh manusia yang hidup di bumi ini, terutama pada daerah rawan bencana. Indonesia merupakan negara yang rawan bencana bahkan dikenal sebagai Laboratorium Bencana Alam. Kedatangan bencana tidak dapat dihindari tetapi harus kita hadapi. Manusia tidak perlu takut pada bencana, tetapi manusia harus dapat menghadapi bencana.

Definisi tentang bencana bermacam-macam, menurut Gustavo (1995) menjelaskan secara umum bencana merupakan suatu pengaruh yang diterima manusia sehingga mengakibatkan manusia menjadi kehilangan dan menderita kerugian. Dengan kata lain, dapat dikatakan sebagai bencana apabila kejadian tersebut membawa kerugian bagi manusia. Manusia mempunyai kemampuan untuk meminimalkan resiko yang terjadi, sehingga apabila risiko dapat diminimalkan maka bencana dikatakan dapat teratasi atau berkurang dampaknya.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, memberikan batasan-batasan terkait dengan fenomena bencana alam sebagai berikut :

- a) Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- b) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- c) Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- d) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Sedangkan menurut WHO, bencana merupakan segala kejadian yang menyebabkan kerusakan lingkungan, gangguan geologis, hilangnya nyawa manusia atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan

kesehatan skala tertentu, yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau wilayah tertentu (Indiyanto, 2012). Bencana adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Beberapa pengertian mengenai bencana yang telah disampaikan di atas, maka dapat disampaikan bahwa yang dimaksud dengan bencana adalah suatu kerusakan ekologi, sosial, material serta yang lainnya, dan terjadi oleh aktifitas *abnormal* alam maupun perilaku manusia dan menyebabkan kerugian baik secara material fisik, ataupun korban jiwa.

2.1.2.2 Faktor Penyebab Bencana

Bencana merupakan fenomena yang dapat terjadi setiap saat, secara tiba-tiba atau melalui proses yang berlangsung secara perlahan dimanapun dan kapanpun, sehingga dapat menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi kehidupan masyarakat. Selain kaya akan potensi alam, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki potensi bencana, bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin puting beliung, dan letusan gunung berapi.

Faktor penyebab bencana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a) Bencana hidrometeorologis yang meliputi banjir, tanah longsor, gelombang pasang, abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, serta angin puting beliung.
- b) Bencana geologis yaitu gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api.

Banyaknya daerah yang rawan terkena bencana di Indonesia tidak terlepas dari faktor geologis Indonesia, dimana terdapat tiga pertemuan Lempeng besar yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Indo-Australia. Indonesia terletak pada Lingkaran Api Pasifik (*Ring of Fire*) atau kawasan yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik.

Pertemuan tiga lempeng ini menghasilkan lempeng tektonik yang merupakan gempa bumi dan deretan gunung api. Terdapat 129 gunung api aktif yang ada di Indonesia, yang saat ini dimonitor oleh Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (ESDM). Sedangkan untuk pergerakan lempeng tektonik dimonitor oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Kekayaan Indonesia dengan beragam gunung berapi sekaligus dapat menjadi ancaman bencana gunung meletus. Posisi tersebut membuat Indonesia menjadi rentan terhadap perubahan geologi, terutama bencana alam gempa bumi, tsunami, letusan gunungapi, dan jenis-jenis bencana geologi yang lain. Wilayah yang rawan bencana gempa bumi di Indonesia tersebar disepanjang Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Maluku Utara dan wilayah Papua (Setyowati, 2017).

Klasifikasi bencana alam berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Bencana alam Geologis.

Bencana alam ini disebabkan oleh gaya-gaya yang berasal dari dalam bumi (gaya *endogen*). Atau biasa disebut bencana alam yang terjadi akibat bergeraknya lempeng bumi, yang termasuk dalam bencana alam geologis adalah gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Bencana yang diakibatkan oleh faktor geologis biasanya banyak menelan korban dan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian baik secara material maupun kerugian non material. Bencana alam geologis merupakan bencana alam yang paling banyak menelan korban jiwa di Indonesia.

b) Bencana alam Klimatologis.

Bencana alam klimatologis merupakan bencana alam yang disebabkan oleh faktor cuaca dan iklim, Contoh bencana alam klimatologis adalah banjir, badai, banjir bandang, angin puting

beliung, kekeringan, dan kebakaran alami hutan yang terjadi ketika musim kemarau dan sangat kering. Gerakan tanah (longsor) termasuk juga bencana alam, walaupun pemicu utamanya adalah faktor klimatologis (hujan), tetapi gejala awalnya dimulai dari kondisi geologis (jenis dan karakteristik tanah serta batuan dan sebagainya). Bencana alam klimatologis yang terjadi belakangan ini diakibatkan oleh perubahan iklim global yang terjadi di seluruh dunia.

c) Bencana alam Ekstra-Terrestrial.

Bencana alam Ekstra-Terrestrial adalah bencana alam yang terjadi di luar angkasa, seperti jatuhnya meteor. Bila hantaman benda-benda langit mengenai permukaan bumi maka akan menimbulkan bencana alam yang dahsyat bagi penduduk bumi. Gejala alam yang dapat menimbulkan bencana alam pada dasarnya mempunyai karakteristik umum, yaitu gejala awal, gejala utama, dan gejala akhir. Dengan demikian, jika kita dapat mengetahui secara akurat gejala awal suatu bencana alam, kemungkinan besar kita dapat mengurangi akibat yang ditimbulkannya.

2.1.2.3 Karakteristik Bencana di Indonesia

Upaya memperkecil risiko bencana dapat dilakukan dengan merubah perilaku manusia, meningkatkan kesadaran dan kepedulian untuk melestarikan lingkungan. Merubah perilaku manusia dapat dilakukan dengan merubah pola pikir dan membiasakan diri sejak dini untuk selalu peduli pada lingkungan dan sadar bencana. Mendahulukan keselamatan dari bencana dengan cara selalu sosialisasi kesiapsiagaan bencana, melakukan simulasi bencana, maupun mempraktikan berbagai upaya pencegahan bencana

Menurut Dr Prih Harjadi, dkk, dalam bukunya yang berjudul panduan Pengenalan Karakteristik bencana dan Upaya Mitigasinya di Indonesia tahun 2005 tentang karakteristik bencana yang mengancam di Wilayah Indonesia ini perlu dipahami oleh aparat pemerintah dan

masyarakat terutama yang tinggal di wilayah yang rawan bencana. Upaya mengenal karakteristik bencana yang sering terjadi di Indonesia merupakan suatu upaya mitigasi, sehingga diharapkan dampak dari bencana dapat dikurangi. Salah satu penyebab timbulnya bencana di Indonesia adalah kurangnya Pemahaman terhadap karakteristik ancaman bencana. Sering kali seolah-olah bencana terjadi secara tiba-tiba sehingga masyarakat kurang siap menghadapinya, akibat timbul banyak kerugian bahkan korban jiwa (Harjadi, 2005).

2.1.2.4 Mekanisme Penanggulangan Bencana

Departemen Sosial Republik Indonesia dalam bukunya tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 menyatakan bahwa penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Dalam pasal 4 mengatakan bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. Menyelaraskan peraturan perundang-undang yang ada
- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana
- c. Menhargai budaya lokal
- d. Membangun partisipasi dan kemitraan public serta swasta
- e. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, kedermawanan
- f. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat berbagai dan bernegara

Salah satu model penanggulangan bencana adalah model siklikal. Model penanggulangan bencana dikenal sebagai siklus penanggulangan bencana yang terdiri dari tiga fase, yaitu Fase Pra Bencana, Fase Saat Terjadi Bencana, dan Fase Pasca Bencana (UNDP, 2012).

- a. Fase Pra Bencana

Pada fase pra bencana pendekatannya adalah melalui pengurangan risiko bencana dengan tujuan untuk membangun keluarga dan masyarakat Indonesia yang tangguh dalam menghadapi ancaman bencana. Adapun kegiatan yang termasuk kedalam tahap Pra Bencana diantaranya :

- 1) Kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiagaan adalah tahapan yang paling strategis, karena sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi datangnya suatu bencana.
- 2) Peringatan dini, yaitu suatu informasi yang disampaikan dengan segera kepada semua pihak, khususnya mereka yang potensi terkena bencana maupun kemungkinan datangnya suatu bencana di daerahnya masing-masing. Peringatan didasarkan pada berbagai informasi teknis maupun ilmiah yang dimiliki, diolah atau diterima dari pihak berwenang mengenai kemungkinan datangnya suatu bencana.
- 3) Mitigasi, yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman bencana (PP No. 21 tahun 2008). Upaya mitigasi dapat dilakukan dalam bentuk mitigasi struktural dengan memperkuat bangunan dan infrastruktur yang berpotensi terkena bencana, seperti membuat kode bangunan, desain rekayasa, dan konstruksi untuk menahan serta memperkuat struktur ataupun membangun struktur bangunan dan lain-lain. Selain itu upaya mitigasi juga dapat dilakukan dalam bentuk non struktural, di antaranya seperti menghindari wilayah bencana dengan cara membangun menjauhi lokasi bencana yang dapat diketahui

melalui perencanaan tata ruang dan wilayah serta dengan memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah.

b. Fase Saat Terjadi Bencana

Dalam fase ini kegiatan yang dilakukan adalah tanggap darurat bencana yang menjadi sasarannya adalah “*save more lives*”. Kegiatan utamanya adalah pencarian, penyelamatan, dan evakuasi serta pemenuhan kebutuhan dasar berupa air minum, makanan dan penampungan/shelter bagi para korban bencana. Selain itu juga dilakukan perbaikan darurat yang diutamakan untuk memfungsikan kembali sarana dan prasarana vital sebagai penunjang tata kehidupan dan penghidupan masyarakat seperti, layanan kesehatan, transportasi, listrik, komunikasi, pasar, dan perbankan serta pasokan energi lainnya. Tanggap darurat bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadi bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, seperti penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana prasarana. Tindakan ini dilakukan oleh Tim penanggulangan bencana yang dibentuk di masing-masing daerah atau organisasi.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam kondisi tanggap darurat antara lain:

- 1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya, sehingga dapat diketahui dan diperkirakan *magnitude* bencana, luas area yang terkena dan perkiraan tingkat kerusakannya.
- 2) Penentuan status keadaan darurat bencana.
- 3) Berdasarkan penilaian awal dapat diperkirakan tingkat bencana sehingga dapat pula ditentukan status keadaan darurat.
- 4) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana

c. Fase Pasca Bencana

Pada fase pasca bencana, aktivitas utama yang ditargetkan yaitu memulihkan kembali kondisi tata kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik (*build back better*) meskipun dengan segala keterbatasan. Setelah bencana terjadi dan setelah proses tanggap darurat dilewati, maka langkah berikutnya adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pengetahuan atau *knowledge* adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengungkapkan atau mengingat kembali pengetahuan, rumus-rumus konsep, prinsip-prinsip, materi dan kejadian baik pada hal-hal yang umum maupun khusus. Pengetahuan kebencanaan akan dibutuhkan bagi setiap orang yang tinggal di daerah rawan bencana, karena berbagai informasi mengenai jenis bencana, prosedur penyelamatan diri, tempat yang disarankan untuk mengungsi, dan informasi lain yang mungkin dibutuhkan seseorang pada sebelum, pada saat dan pasca bencana itu terjadi.

2.1.3 Kampung Siaga Bencana

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana tidak disebutkan definisi kampung secara terpisah, akan tetapi langsung pada kampung siaga bencana yang merupakan suatu wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana. Kedudukan kampung siaga bencana berada di kecamatan/kelurahan/ desa/dusun (Belanawane, 2015).

Di beberapa wilayah kampung merupakan bagian dari desa/kelurahan dan setara dengan dusun karena mempunyai karakteristik terbelakang atau belum modern. Apabila dibandingkan konsep desa/kelurahan tangguh bencana dengan kampung siaga bencana maka terlihat bahwa konsep desa/kelurahan tangguh bencana mengacu pada definisi desa sebagai wilayah administratif, sedangkan konsep kampung siaga bencana tidak mengacu pada definisi kampung.

Kampung siaga bencana (KSB) merupakan sebuah program pemerintah dalam penanggulangan bencana dengan melibatkan peran aktif masyarakat lokal dan mampu mengelola kerentanan, ancaman serta resiko yang terjadi di wilayah sesuai dengan potensi lokal sehingga masyarakat lebih siap siaga dalam menghadapi bencana (Belanawane, 2015). Program Kampung Siaga Bencana pertama kali diluncurkan pada tahun 2011 oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban bencana Alam, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI. Kampung siaga bencana dibentuk dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan risiko bencana dengan cara menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada pada lingkungan setempat.

Salah satu contoh Kampung Siaga Bencana yang telah terwujud yaitu berada di Kabupaten Kulon Progo (Juliari, 2020). Bencana alam merupakan kejadian yang pasti terjadi, kita tidak bisa lepas dari bencana khususnya bencana alam. Kenapa dipilih Kulon Progo Karena letaknya berada di kawasan pesisir selatan pulau Jawa yang memiliki potensi bencana cukup rawan (Mensos RI, 2020). Penanganan bencana baik dari tahap pencegahan, tahap darurat dan rekontruksi senantiasa membutuhkan sinergi baik antarinstansi pemerintah maupun pemerintah dengan masyarakat (Juliari, 2020).

Salah satu keberhasilan dari Kampung Siaga Bencana yaitu masyarakat daerah tersebut dapat menangani bila terjadi bencana tanpa harus menunggu relawan datang (Mensos RI, 2020). Prakarsa dan inisiatif dari masyarakat sangat penting, karena masyarakat berada di ujung paling depan dalam penanganan bencana (Belanawane, 2015).

Tujuan dibentuknya kampung siaga bencana adalah :

- a. Memberikan Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana.

- b. Membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat dan memperkuat interaksi sosial anggota masyarakat.
- c. Mengorganisasikan masyarakat terlatih siaga bencana.
- d. Menjamin terlaksananya kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang berkesinambungan
- e. Mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk penanggulangan bencana

Apabila dilihat dari tujuannya, Kampung Siaga Bencana (KSB) hampir sama dengan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana) (Belanawane, 2015). Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama.

Namun dalam perumusan tujuan kampung siaga bencana cenderung lebih kompleks dengan memberikan sesuatu yang baru dan upaya mengoptimalkan pada penanggulangan bencana berbasis masyarakat yaitu memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat, membentuk jejaring dan memperkuat interaksi sosial, mengorganisasikan, menjamin kesinambungan, mengoptimalkan potensi dan sumber daya. KSB dibentuk dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan risiko bencana dengan cara menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada pada lingkungan setempat (DPSKBA RI, 2016). Pengembangan Kampung Siaga Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan

kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Kampung Siaga Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberlanjutan. Kampung Siaga Bencana didirikan berdasarkan dari seringnya terjadi bencana hingga di dirikanlah kampung siag bencana Desa Sindangjaya.

Kampung Siaga Bencana diharuskan memiliki posko induk sebagai:

- a. Pusat kendali operasional
- b. Lambung gudang logistik
- c. Tempat berkumpulnya masyarakat KSB

Adapun struktur organisasi Kampung Siaga Bencana yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara. Dan ada enam Devisi di antaranya Devisi Posko, Devisi TRC (tim reaksi cepat), Devisi Evakuasi, Devisi Komunikasi, Devisi Shelter, dan Devisi Transportasi. Anggota yang telah mengikuti pelatihan standar kebencanaan yang terdiri dari materi dan praktek sebanyak 20 orang dan masyarakat yang berpartisipasi didalamnya terdiri dari 60 orang (DPSKBA RI, 2016).

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian dengan tema sejenis telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dalam bentuk jurnal nasional. Untuk lebih jelasnya, hasil penelitian dan kontribusi dari penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kajian Penelitian yang Relevan

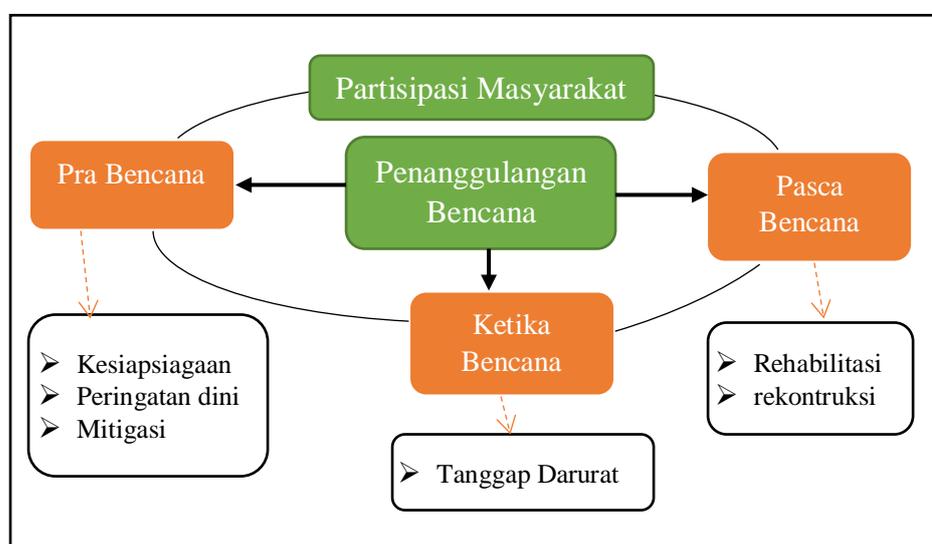
Aspek	Penelitian yang Relevan			Penelitian yang dilakukan
	Femil Umeidini ¹ , Eva Nuriah ² , Muhammad Fedryansyah ³	Herman Edyanto	Muhamad Roudhotul Ulum ¹ , Eva Banowati ² , Erni Suharini ³	
Judul	Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana di Desa Mekargalih Kecamatan Jatinangor	Partisipasi Masyarakat sebagai upaya untuk Mengurangi Risiko Bencana Tsunami di Daerah Pantai	Partisipasi Masyarakat Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik terhadap Upaya Penanggulangan Bencana Tanah Longsor	Partisipasi masyarakat dalam Penanggulangan Bencana untuk Mewujudkan Kampung Siaga Bencana di Desa Sindangjaya.
Lokasi	Jatinangor	Daerah Pantai	Kelurahan Tinjomoyo	Desa Sindangjaya
Jenis Bencana	Banjir dan Longsor	Tsunami	Tanah Longsor	Tsunami dan Banjir Rob
Kajian Penelitian	Penelitian ini mengkaji dan mengidentifikasi partisipasi masyarakat ketika terjadi bencana banjir dan longsor. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan beberapa bentuk partisipasi masyarakat yang dijalani sehingga dapat mengatasi hal-hal yang harus dilakukan ketika bencana banjir datang.	Penelitian ini mengkaji dan memperkenalkan permasalahan tsunami tingkat bahaya dan tindakan yang dilakukan sebagai upaya pengurangan risiko bencana.	Penelitian ini mengkaji partisipasi masyarakat terhadap upaya penanggulangan tanah longsor, serta mengidentifikasi hambatan masyarakat dalam partisipasi terhadap upaya penanggulangan bencana tanah longsor di Kelurahan Tinjomoyo Kecamatan Banyumanik.	Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus pada peanggulangan bencana yang dilakukan dalam mewujudkan Kampung Siaga Bencana. Selain itu juga menjelaskan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Kampung Siaga Bencana di Desa Sindangjaya.
Tahun	2019	2014	2017	2022

Sumber : Data Hasil Studi Pustaka

2.3 Kerangka Teoretis

2.3.1 Bentuk-bentuk Penanggulangan Bencana dalam mewujudkan Kampung Siaga Bencana di Desa Sindangjaya

Dalam penelitian ini akan memfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Desa Sindangjaya, yang terdiri dari tiga tahapan yaitu partisipasi masyarakat pada kegiatan tahap pra bencana, kegiatan saat terjadi bencana serta kegiatan pada tahap pasca bencana sebagaimana gambar 2.1. berikut ini :



Sumber : diadaptasi dari PP BNPB Nomor 4 tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana

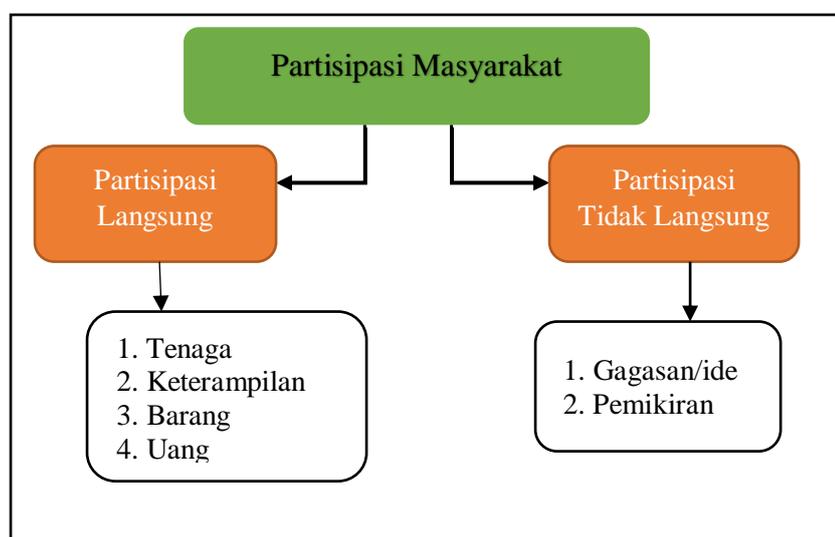
Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penanggulangan Bencana

Pada Gambar 2.1 mendeskripsikan kerangka pemikiran partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Pada dasarnya kegiatan penanggulangan bencana dilakukan dalam tiga fase, yaitu sebelum terjadinya bencana dengan melakukan upaya kesiapsiagaan,, peringatan dini dan mitigasi bencana. Kemudian fase kedua yaitu pada saat terjadi bencana dengan melakukan upaya tanggap darurat kepada korban bencana melalui penyelamatan korban, pencarian korban, pemenuhan kebutuhan korban baik dari segi makanan, pakaian maupun tempat tinggal. Dan fase terakhir yaitu setelah

terdinya bencana melalui upaya pemulihan kembali dengan kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi.

2.3.2 Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana di Desa Sindangjaya

Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat dalam penanggulangan bencana dapat berupa ide maupun pemikiran, barang, tenaga ataupun dapat juga berupa uang. Bentuk partisipasinya baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut ini :



Sumber : diadaptasi dari Sastropetro (1986)

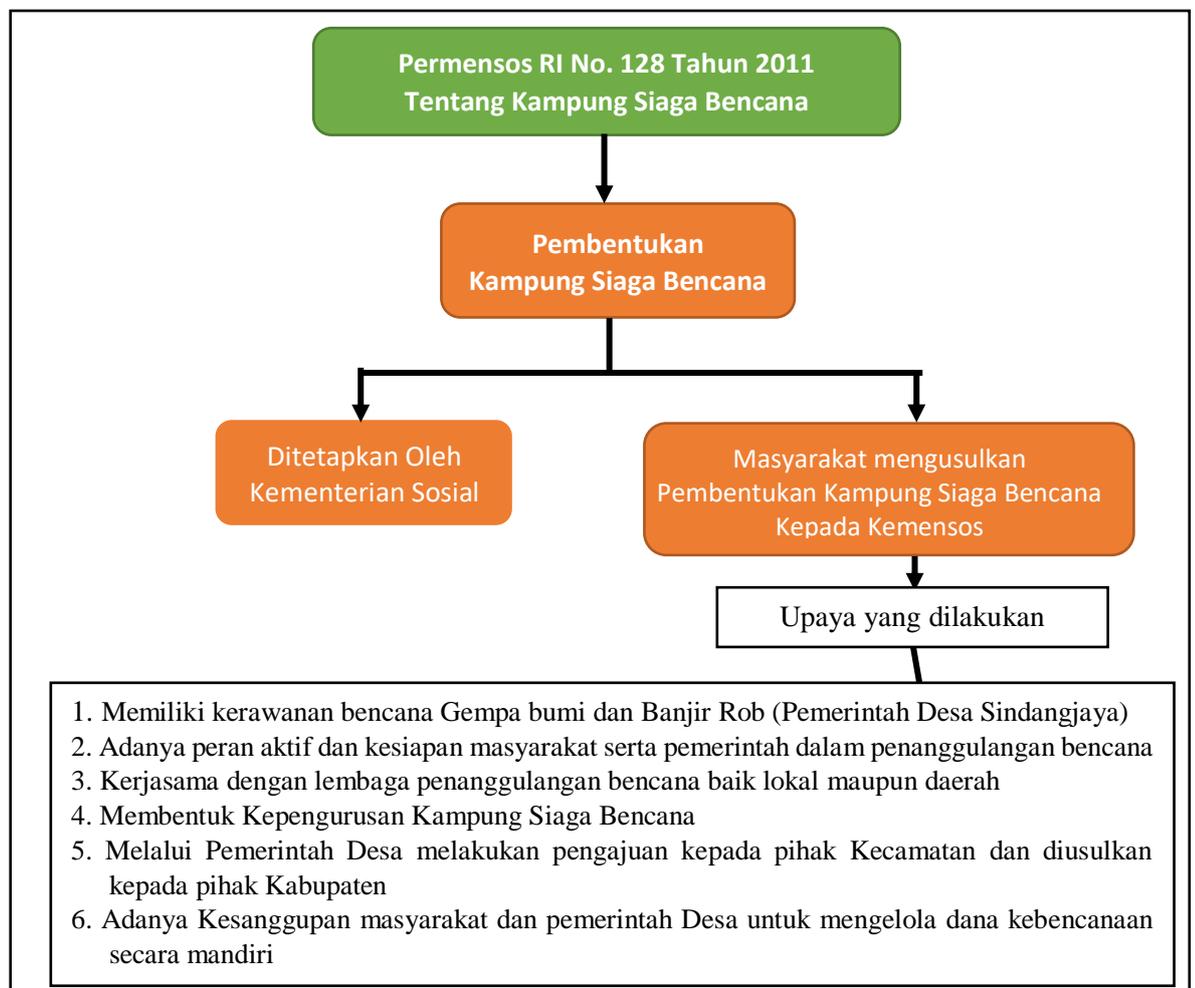
Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran Partisipasi Masyarakat

Pada Gambar 2.2 mendeskripsikan kerangka pemikiran partisipasi masyarakat. Pada dasarnya partisipasi masyarakat itu dibagi menjadi dua, yaitu partisipasi secara langsung dan partisipasi secara tidak langsung. Dari hasil pengelompokan tersebut yang termasuk kedalam partisipasi secara langsung dapat berupa tenaga, keterampilan, barang, dan uang. Sedangkan untuk partisipasi secara tidak langsung dapat berupa ide maupun gagasan atau pemikiran yang diberikan oleh masyarakat. Kedua komponen ini sangat dibutuhkan dalam penanggulangan bencana serta dapat dilihat bagaimana

partisipasi dari masyarakat dalam mewujudkan kampung siaga bencana di Desa Sindangjaya.

2.3.3 Upaya yang dilakukan dalam Mewujudkan Kampung Siaga Bencana di Desa Sindangjaya

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Desa Sindangjaya merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan masyarakat Desa Sindangjaya dalam menanggulangi bencana khususnya untuk mewujudkan Kampung Siaga Bencana (KSB) sebagaimana Gambar 2.3 berikut ini:



Sumber : diadaptasi dari Peraturan Mensos RI nomor 128 tahun 2011 tentang kampung Siaga Bencana dan Hasil Penelitian

Gambar 2.3
Tahap Pembentukan Kampung Siaga Bencana

Pada Gambar 2.3, mendeskripsikan tahapan-tahapan yang harus dilengkapi dan dilakukan untuk mewujudkan kampung siaga bencana. Adapun untuk Desa Sindangjaya tahapan yang dilakukan adalah secara mandiri adanya keinginan masyarakat untuk mewujudkan kampung siaga bencana. Peraturan Menteri Sosial RI No 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana, bahwa pembentukan Kampung Siaga Bencana dapat dilakukan dengan dua acara, yang pertama daerah tersebut ditunjuk dan ditetapkan langsung oleh Pemerintah dan yang kedua yaitu masyarakat yang mengajukan dan mengusulkan untuk dibentuknya Kampung Siaga Bencana di daerah tersebut kepada Pemerintah. Untuk Desa Sindangjaya, cara yang dilakukan yaitu dengan *Bottom Up* atau masyarakat yang mengusulkan untuk dibentuknya Kampung Siaga Bencana di wilayah tersebut. Adapun tahapan yang harus dilakukan diantaranya :

1. Memiliki kerawanan bencana Gempa bumi dan Banjir Rob (Pemerintah Desa Sindangjaya)
2. Adanya peran aktif dan kesiapan masyarakat dan pemerintah dalam penanggulangan bencana
3. Kerjasama dengan lembaga penanggulangan bencana baik lokal maupun daerah
4. Membentuk Tim Kepengurusan Kampung Siaga Bencana
5. Melalui Pemerintah Desa melakukan pengajuan kepada pihak Kecamatan dan diusulkan kepada pihak Kabupaten
6. Adanya Kesanggupan pemerintah Desa untuk mengalokasikan Dana Desa

2.4 Pertanyaan Penelitian

2.4.1 Bagaimanakah bentuk-bentuk penanggulangan bencana di Desa Sindangjaya Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya.

- 1) Apakah masyarakat berperan aktif dalam penanggulangan bencana di Desa sindangjaya ?
- 2) Hal apa saja yang harus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar berpartisipasi dalam penanggulangan bencana di Desa Sindangjaya ?

- 3) Apa saja yang dilakukan masyarakat Desa Sindangjaya ketika terjadi bencana?
- 4) Apa saja yang dilakukan masyarakat Desa Sindangjaya setelah terjadi bencana?
- 5) Apa saja yang dilakukan pemerintah Desa untuk memberikan pemahaman ataupun edukasi kebencanaan kepada Masyarakat Desa Sindangjaya?

2.4.2 Bagaimanakah bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana untuk mewujudkan Kampung Siaga Bencana di Desa Sindangjaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

- 1) Bagaimana partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk ide maupun gagasan dalam penanggulangan bencana di Desa sindangjaya?
- 2) Bagaimana partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga dalam penanggulangan bencana di Desa sindangjaya?
- 3) Bagaimana partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk keterampilan dalam penanggulangan bencana di Desa sindangjaya?
- 4) Bagaimana partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk barang dalam penanggulangan bencana di Desa sindangjaya ?
- 5) Bagaimana partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk uang dalam penanggulangan bencana di Desa sindangjaya ?

2.4.3 Upaya apa saja yang dilakukan masyarakat untuk mewujudkan Kampung Siaga Bencana di Desa Sindangjaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya.

- 1) Upaya apa saja yang dilakukan masyarakat untuk mewujudkan Kampung Siaga Bencana Desa Sindangjaya?
- 2) Apakah Pemerintah Desa Sindangjaya menyetujui terwujudnya Kampung Siaga Bencana di Desa Sindangjaya?

- 3) Upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah desa untuk mewujudkan Kampung Siaga Bencana di Desa Sindangjaya?
- 4) Pelatihan kebencanaan apa saja yang sudah masyarakat dapatkan untuk mewujudkan Kampung Siaga Bencana di Desa Sindangjaya?
- 5) Tahapan apa saja yang dilakukan masyarakat Desa Sindangjaya untuk mewujudkan Kampung Siaga Bencana di Desa Sindangjaya?